

Tanah Laut 7 Tahun Raih WTP Berturut- turut



Menerima Laporan – Bupati Tanah Laut (Tala), H Sukamta bersama Wakil Ketua DPRD Tala, H Atmari melalui Video Conference (Vidcon) menerima laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas LKPD dengan opini WTP dari Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Selatan, Tornanda Syaifullah. hms. Sumber :
<https://matabanua.co.id/2020/06/18/tanah-laut-berturut-turut-7-kali-raih-wtp/>

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Laut (Tala) kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, hasil penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2019.

WTP Tahun 2019 ini merupakan yang ketujuh kalinya diraih Pemkab Tala secara berturut-turut dan kepastian diraihnya WTP Kabupaten Tanah Laut disampaikan Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Selatan, Tornanda Syaifullah saat Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2019 yang digelar secara online melalui video conference daring, Selasa (16/6).

Bupati Tala, H Sukamta meluapkan perasaan bahagia dan bangga atas keberhasilan Pemkab Tala yang sudah mendapatkan Opini WTP untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut. H Sukamta bersyukur atas kerja keras yang telah dilakukan oleh Pemkab Tala baik dalam penyusunan LKPD maupun penatausahaan keuangan sekaligus dalam melakukan tindak lanjut dari hasil temuan-temuan dari BPK sehingga hari ini LHP APBD 2019 bisa mempertahankan Opini WTP ketujuh kali. Menurut Sukamta, raihan itu hasil kerja keras dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait seperti Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tala (BPKAD) dan Inspektorat Tala.

Selain itu, Sukamta juga berterimakasih kepada para bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran serta bendahara barang dan jasa. Orang nomor satu di jajaran Pemkab Tala itu mengharapkan kedepannya apa yang sebelumnya menjadi menjadi temuan dari BPK jangan menjadi temuan berulang.

(Sumber dari <https://matabanua.co.id/2020/06/18/tanah-laut-berturut-turut-7-kali-raih-wtp/>)

Sukamta mengatakan apapun yang menjadi temuan BPK tolong jangan lagi menjadi temuan di tahun yang akan datang, artinya masalah klasik seperti itu jangan diulang lagi kedepan supaya kita bisa lebih baik lagi. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tala, H Atmari menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Tala yang kembali mendapat Opini WTP untuk ketujuh kalinya. H Atmari mengatakana bahwa dirinya kira hal ini sungguh luar biasa, berkat binaan dari Bupati Tala H Sukamta yang juga bekerja sama dengan DPRD Tala untuk penyusunan APBD 2019 Tala dan hal itu sangat baik kerja keras dari eksekutif luar biasa kita kembali meraih opini WTP.

Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalsel, Tornanda Syaifullah mengapresiasi seluruh Pemkab/Pemkot se-Kalsel, karena seluruh Kota/ Kabupaten se-Kalsel menerima Opini WTP. Tornanda Syaifullah mengatakan bahwa Sangat luar biasa untuk LKPD 2019 seluruh Kabupaten/Kota se-Kalsel menerima Opini WTP, ini sangat membanggakan. Syaifullah menambahkan opini WTP ini merupakan pernyataan pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria. Dimulai dari hasil penilaian kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kemudian kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern. Syaifullah pun menyampaikan terimakasih kepada seluruh Pemkab/ Pemkot se-Kalsel yang telah bekerja keras, bekerja cerdas dan bekerja cermat dalam mengelola APBD tahun 2019.

(Sumber dari https://rri.co.id/banjarmasin/kabupaten-kota/853171/tanah-laut-7-tahun-raih-wtp-berturut-turut?utm_source=news_main&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign)

Sumber Berita:

1. <https://matabanua.co.id>, *Tanah Laut Berturut-turut 7 Kali Raih WTP*, 10 Desember 2020,165.55 WITA.
2. <https://rri.co.id/banjarmasin>, *Tanah Laut 7 Tahun Raih WTP Berturut- Turut*, 10 Desember 2020,15.55 WITA.

Catatan:

- Laporan Keuangan Pemerintah terdiri atas dua jenis, yaitu (PSAP Nomor 01):
 1. Laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*);
Laporan pelaksanaan anggaran terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo (SAL)
 2. Laporan financial (*financial report*).
Laporan financial terdiri atas Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Sumber: <https://www.scribd.com>

- Menurut SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik), opini audit ada 5 macam, yaitu :
 - **Pendapat wajar tanpa pengecualian (*Unqualified Opinion*) – WTP**
Pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 - **Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (Modified Unqualified Opinion) – WTP – DPP**

Keadaan tertentu mungkin mengharuskan auditor menambahkan suatu paragraf penjelasan (atau bahasa penjelasan yang lain) dalam laporan auditnya.

○ **Pendapat wajar dengan pengecualian** (*qualified opinion*) – **WDP**

Pendapat wajar dengan pengecualian, menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

○ **Pendapat tidak wajar** (*Adverse Opinion*) – **TW**

Pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

○ **Pernyataan tidak memberikan pendapat** (*Disclaimer of Opinion*) – **TMP**

Pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan.